

**ESKALASI KONFLIK INTERNAL SOMALIA PASCA BERDIRINYA
ICU (ISLAMIC COURTS UNION) TAHUN 2000-2007**

Mia Pradita Ningrum – 20120510110

*Program Studi SI Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta*

ABSTRACT

This article tries to explain escalation of Somalia's internal conflict after the establishment of ICU (Islamic Courts Union) in 2000-2007. Conflict escalation happened in Somalia since the establishment of Islamic Courts Union in 2000. Islamic Courts Union is a group of Islamic Court that united in one to create stabilization of economic and politic's sector of Somalia by apply the syariah law to Somalia. Conflict in Somalia decreased for 6 month in 2006 after ICU take the power of Mogadishu from warlord. And ICU got the legitimation from Somalia's society since its success to decrease criminality in Somalia. But after that 6 moth of peace Somalia, a war happened again and the conflict was escalated. The success of ICU did not really success. Therefore some groups in internal Somali's people were against ICU and intervention of other country were happen to destroy the ICU's power in Somalia

Keywords: *escalation, conflict, Somalia, Islamic Courts Union, 2000-2007*

Pendaahuluan

Somalia adalah salah satu Negara di kawasan Afrika yang dikenal dengan konflik berkepanjangan, dinamika konflik di Somalia sangat kompleks dan mengakar. Penyebab dari konflik tersebut sangat banyak sehingga konflik terus terjadi hingga berpuluh-puluh tahun (Abdul, 2008). Konflik yang terjadi di Somalia berawal dari warisan penjajahan Inggris dan Italia dimana kedua Negara

tersebut membagi wilayah Somalia menjadi dua wilayah kependudukan penjajahan yaitu *British Somaliland* di bagian utara Somalia yang dikuasai Inggris dan *Italian Somalia* di bagian selatan yang dikuasai Italia. Kedua Negara penjajah tersebut membagi-bagi etnis di Somalia menurut budaya mereka sendiri, masing-masing Negara Penjajah mengistimewakan dua kelompok etnis jajahannya. Hal ini memicu terjadinya gesekan-gesekan dengan etnis yang sudah ada sebelum masa kolonialisme serta gesekan dengan etnis minoritas di Somalia.

Kemudian pada masa kemerdekaan Somalia tahun 1960 kedua wilayah jajahan tersebut dipersatukan membentuk Republik Somalia dengan Presiden pertamanya Abdullah Usman, wakil-wakil dari suku Somalia bagian utara dan bagian Somalia bagian selatan tergabung dalam sistem pemerintahan Somalia untuk membangun persatuan dari kedua suku Somalia (Rahmawati, 2015). Semenjak saat itu muncul pergerakan-pergerakan etnis yang menuntut hak kependudukan wilayah dan menyulut terjadinya konflik di Somalia. Kemerdekaan Somalia tidak lantas meredam gesekan-gesekan etnis yang telah terjadi pada masa kolonialisme. Sebaliknya hal tersebut membuat konflik semakin meningkat karena etnis-etnis Somalia tidak hanya sekedar menginginkan kemerdekaan melainkan pencapaian kepentingan etnis itu sendiri, hal tersebut terjadi karena perbedaan yang sangat mendasar antar kelompok etnis Somalia.

Konflik Somalia diperparah dengan kudeta yang dilakukan oleh Mayjen Mohamed Siad Barre, hal tersebut menunjukkan tonggak penting instabilitas di wilayah ini. Kekuasaan yang kemudian dianksasi oleh pemerintahan yang berhaluan komunis itu menyatakan dirinya sebagai negara sosialis serta bergabung dengan Liga Arab pada tahun 1974. Siad Barre yang berlaku sebagai diktator memicu kesenjangan yang sangat curam di masyarakat. Hal ini kemudian mendorong kemunculan berbagai kesatuan aksi pemberontakan yang dimulai pada sekitar awal 1981. Kemudian Presiden Siad Barre jatuh dari kepemimpinannya pada bulan Januari 1991. Pasca digulingkannya pemerintahan presiden Siyaad, kondisi Somalia semakin kacau dan

tidak aman karena tidak memiliki pemerintahan dan hukum terpusat yang mampu mengatur masyarakatnya sehingga pergolakan dan perang antar kelompok etnis terus berlangsung demi menguasai ibukota Somalia yaitu Mogadishu.

Setelah jatuhnya pemerintah Somalia pada tahun 1991, sebuah sistem berdasarkan syariah Islam menjadi sistem yang diperjuangkan oleh Syeikh Sharif. ICU (Islami Court Union) adalah Uni Pengadilan Islam yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menghentikan kriminalitas serta memerangi kekerasan yang terjadi di Somalia akibat konflik internal Somalia. ICU mulai menawarkan pelayanan-pelayanan lain seperti pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. ICU juga bertindak sebagai pasukan kepolisian setempat, dan mendapatkan sokongan dana dari para pengusaha setempat, untuk mengurangi kejahatan. Kemunculan Uni Pengadilan Islam di Somalia seharusnya bisa membawa perdamaian, keamanan dan stabilitas di Somalia. Penduduk sipil Somaliapun mendukung Uni Pengadilan Somalia karena keadaan Somalia yang membaik dan semakin aman ketika awal berdirinya Uni Pengadilan Islam hingga tahun 2006. Namun kenyatannya konflik justru muncul kembalidan semakin parah seiring dengan berjalannya waktu. perang besar kembali terjadi di Somalia setelah peristiwa pemberontakan terhadap Siyaad Barre yaitu perang pada tahun 2006 hingga 2007 tepatnya setelah Islamic Courts Union berhasil menguasai Mogadishu Somalia dan mendapatkan penerimaan dari masyarakat Somalia yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok *warlord* yang menguasai wilayah Somalia semenjak Pemerintahan Siyaad Barre runtuh.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah berupa Mengapa konflik di Somalia mengalami eskalasi pasca berdirinya *Islamic Court Union*?

Kerangka Pemikiran

Konsep Mediator yang baik

1. Jujur

Seorang mediator harus seorang yang jujur. Mediator haruslah menjelaskan secara jelas apa yang ditawarkan, mengapa terlibat dalam suatu proses perundingan, dan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang berkonflik dan mediator sendiri.

2. Mengedepankan nilai-nilai kehidupan

Seorang mediator harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik dalam sebuah komitmen untuk melindungi kehidupan, baik di antara pihak-pihak yang bertikai dan kehidupan masyarakat sipil. Hal ini untuk menghindari munculnya cara-cara yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

3. Dapat dipercaya

Seorang mediator haruslah bersedia menjaga kerahasiaan dari sebuah perundingan. Hal ini berarti bahwa proses pelaksanaan mediasi berlangsung secara rahasia.

4. Berusaha menghindari kekerasan dan intimidasi

Seorang mediator harus mempunyai pandangan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.

5. Pemberdayaan para pihak yang berkonflik

Pemberdayaan para pihak (individual empowerment), yang berarti bahwa dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk sedapat mungkin menemukan sendiri solusi terbaik permasalahan mereka.

Teori Konflik

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial, konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan (Miall, 2007). Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Sedangkan menurut Pruitt dan Rubin konflik merupakan suatu perbedaan kepentingan yang terjadi, atau keyakinan dimana aspirasi dan tujuan dari beberapa pihak mengalami suatu perbedaan dan pertentangan sehingga tidak dapat dicapai secara bersamaan (Pruitt).

Sementara itu yang dimaksud dengan eskalasi konflik adalah peningkatan intensitas konflik dan tingkat penggunaan taktik yang digunakan dalam mengejar tujuan dalam konflik tersebut. Hal ini didorong oleh perubahan dalam masing-masing pihak yang berkonflik, pola-pola baru yang digunakan dari interaksi di antara mereka, dan keterlibatan pihak baru dalam konflik. Ketika konflik meningkat, aktor yang terlibat cenderung meningkat juga. Hal tersebut kemudian akan menyebabkan ancaman lebih besar dan kuat dan akan menjatuhkan sanksi lebih keras lagi dan berlanjut pada kekerasan yang akan semakin parah. Luas wilayah dalam konflik juga ikut meningkat, dan kemungkinan besar akan menimbulkan Negara lain secara aktif akan terlibat dalam pertempuran (Maiese, 2003).

Menurut Ted Robert Gurr eskalasi konflik dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendorong, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah (Crocker, 2001):

- a. *Local context*

Local context sebagai penyebab kemunculan konflik etnis merupakan hal yang sangat mendasar yang menyangkut kesadaran adanya perbedaan visi dan misi dalam kehidupan bersama dalam suatu daerah.

b. *Natinal context*

Krisis pada situasi nasional dalam sebuah negara, dimana dalam sebuah wilayah tersebut terdapat kondisi nasional yang buruk yang menyebabkan Negara tersebut menjadi *weak state* sehingga menimbulkan benih - benih konflik. Krisis sosial ekonomi dan politik yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat membuat masyarakat tersebut melakukan pemberontakan.

Menurut Michael E Brown, ada beberapa faktor struktural yang menyebabkan adanya konflik internal yaitu *weak states*, *intrastates security concern*, dan *ethnic geography*. *Weak states* adalah sebuah Negara yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok etnis-etnis yang berkonflik. Baik yang terjadi di dalam satu wilayah kekuasaan berdaulat atau lebih. Secara status, negara tersebut merdeka, tetapi pada kenyataannya tidak benar-benar berdaulat. Dalam beberapa aspek, tidak hanya keamanan militer, tetapi secara sosial-ekonomi kurang berkembang, bahkan terpuruk. Bahkan di level pemerintahan dipenuhi elit-elit berkepentingan kelompok dan korupsi pun merajalela (Prasodjo, 2013). Indikator dari *weak states* sendiri adalah (Wylter, 2008):

1. Stabilitas dan Keamanan di dalam sebuah Negara

Negara lemah sering berada dalam konflik, atau beresiko terhadap situasi dan instabilitas politik dan ekonomi, atau baru saja keluar dari situasi konflik.

2. Efektivitas Pemerintahan

Negara dapat dipersulit dengan adanya pemerintahan yang buruk, korupsi, dan kurangnya layanan kebutuhan mendasar terhadap penduduknya. Dalam beberapa kasus, seperti Korea Utara dan Zimbabwe, hal tersebut dapat terjadi karena

kurangnya kepedulian pemimpin negara, atau keinginan politik, untuk menyediakan fungsi utama kepada seluruh rakyatnya.

3. Kontrol teritorial dan poros batas negara

Salah satu indikator negara lemah dan negara gagal adalah karena kurangnya kontrol yang efektif atas teritorialnya, militernya, atau kekuatan hukumnya atas wilayah yang penuh dengan ketidakstabilan, beberapa tempat dapat juga disebut “wilayah tanpa kekuasaan”. Batas antara Pakistan-Afganistan dan wilayah Sahel di daerah afrika utara merupakan contoh unsur-unsur eksis / berisiko yang dapat menimbulkan kegagalan sebuah negara.

4. Stabilitas Ekonomi

Beberapa negara lemah juga merupakan negara yang masuk dalam negara-negara termiskin di dunia. Sebagai konsekuensi dari kurang keamanan dan politik, negara lemah dan gagal sering kurang berhasil dalam mempertahankan pembangunan ekonominya. Contoh, Bangladesh dan beberapa negara di Sub-Sahara Afrika.

c. *International context*

Merupakan sebuah situasi konflik dimana terdapat pihak asing atau pihak ketiga yang mempengaruhi. Menurut Robert Gurr konflik etnis sejatinya bukan hanya melibatkan kedua etnis yang bertikai sebagai aktor tunggal. Namun konflik etnis yang terjadi dalam sebuah negara tidak pernah lepas dari pihak ketiga atau pihak asing (Crocker, 2001).

Faktor faktor dari pihak asing atau pihak ke tiga mampu membentuk aspirasi, kesempatan dan strategi dari kelompok etnis. Faktor tersebut juga dapat mempengaruhi kebijakan sebuah Negara terhadap kaum minoritas atau klan yang ada di Negara tersebut (Crocker, 2001). Bentuk faktor yang berpengaruh dari pihak asing terhadap suatu konflik di sebuah Negara dapat berupa material, moral dan politik. Bantuan dari pihak asing terhadap salahsatu pihak yang berkonflik disebuah Negara

sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan konflik tersebut, mulai dari durasi konflik yang akan terjadi, konflik akan semakin larut dan tak kunjung selesai, banyaknya korban yang akan jatuh, dan penyelesaian dari konflik itu sendiri.

Dinamika Konflik Somalia

Semenjak awal berdirinya Somalia, Negara ini telah menjadi Negara yang dilanda konflik parah. Hal tersebut disebabkan oleh karena keinginan etnis-etnis di Somalia yang lebih dari sekedar menginginkan untuk merdeka dan berdaulat melainkan dibarengi dengan pencapaian kepentingan etnis masing-masing, etnis di Somalia yang beragam memiliki perbedaan yang mendasar. Hal ini semakin diperparah ketika Inggris dan Italia masuk dan mengotak-kotakkan etnis menurut budaya mereka sendiri. Hal ini memicu kelanjutan dari konflik etnis. Kedua kelompok masyarakat bekas jajahan Inggris dan Italia tersebut diistimewakan oleh kedua Negara kolonial itu dan memicu gesekan dengan etnis minoritas Somalia bagian lainnya.

Konstitusi yang dibuat tahun 1961 yang bertujuan untuk menyatukan Somalia bagian utara dan Somalia bagian selatan untuk bersatu membentuk kehidupan bernegara Somalia yang berdaulat justru kurang berdampak baik bagi Somalia karena tidak ada kompromi politik yang cukup baik antara masyarakat Somalia bagian utara dan bagian selatan. Karena konstitusi Somalia 1961 dianggap lebih menguntungkan masyarakat Somalia bagian utara dan merugikan masyarakat Somalia bagian selatan mengenai hak katas kependudukan wilayah Somalia.

Kemudian pada tahun 1967 Abdi Rashid Ali Shemarke yang merupakan seorang perdana menteri yang dipecat oleh Presiden Abdullah Osman terpilih menjadi presiden Somalia yang kedua, presiden kedua Somalia ini berasal dari kalangan sipil juga. Namun kepemimpinan dari Shemarke ini hanya bertahan selama 3 tahun masa pemerintahan karena terjadi kudeta yang dilakukan oleh mayor jenderal Muhammad Siyaad Barre pada tanggal 21 Oktober 1979. Dengan kudeta ini Siyaad Barre mampu

mengambil alih kepemimpinan nasional Somalia dan menjadi presiden Somalia yang ketiga.

Pada tahun 1969 Mayor jenderal Siyaad Barre yaitu seorang komandan tentara Somalia yang berhaluan sosialis melakukan kudeta militer atas pemerintahan presiden Somalia yang kedua Shermarke, kudeta itupun berhasil membawa Siyaad Barre menjadi presiden Somalia yang ketiga. Siyad Barre kemudian menguasai Somalia hingga masa kepemimpinannya selama 22 tahun. Pada masa pemerintahannya, Siyaad Barre mencoba membangun pemujaan kepribadian terhadap dirinya, yaitu menampilkan poster poster bergambarkan dirinya di Mogadishu pada saat itu. Terjadi kesenjangan sosial yang sangat curam di masyarakat. Hal ini kemudian mendorong kemunculan berbagai kesatuan aksi pemberontakan yang dimulai pada sekitar awal 1981. Pada tahun tersebut, kemunculan The Somali National Movement (SNM) dan The Somali Salvation Front (SSF) yang bergabung dengan partai radikal kiri Somali Workers Party (SWP) dan Democratic Front for the Liberation of Somalia (DFLS) bersama membentuk suatu aksi bersama yang dinamakan Somali Salvation Democratic Front (SSDF) (Pramoda, 2014).

Hingga pada akhirnya pada tahun 1991 presiden Siyaad Barre berhasil digulingkan oleh rakyat Somalia. Semenjak saat itu Somalia tidak mempunyai pemerintahan yang tetap dan dilegitimasi oleh masyarakatnya. Keadaan Somalia semakin kacau, kelompok-kelompok yang pada awalnya bersatu menentang dan pada akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan Siyaad Barre terpecah menjadi dua setelah mereka berhasil melengserkan Presiden Siyaad Barre dari kursi kepresidenan Somalia yaituyang dipimpin oleh Ali Mahdi dan yang lainnya dipimpin oleh Mohammed Farrah Aidid. Kedua kubu internal ini terus bertikai dan berperang memperebutkan kendali atas Somalia. Hasil dari perang saudara ini adalah kehancuran dari system pertanian di Somalia. Pada bulan Juni 1995, *Somali National Alliance* atau SNA mengangkat Mohammed Farrah Aidid sebagai Presiden Somalia

versi mereka, namun hal tersebut tidak diakui oleh dunia internasional maupun kelompok lain selain SNA.

Kemudian pada tahun 1996 Farrah Aidid tewas akibat tembakandari kelompok lain yang ingin menguasai Somalia, dan kemudian putra dari Mohammed Farrah Aidid yang bernama Hussein Muhammad Farrah Aidid diangkat menjadi presiden SNA menggantikan ayahnya.

Selain fenomena Negara dalam Negara terdapat pula beberapa perang besar yang terjadi di Somalia yaitu pada tahun 1993, 2006 dan 2007. Dimanan pada tahun 1993 merupakan perang yang terjadi antara Amerika Serikat yang didukung PBB melawan Farrah Aidid yang merupakan salah satu pemberontak penggulingan presiden Siyaad Barre dengan misi menitik beratkan pada restorasi keamanan, peningkatan infrastruktur, dan membantu rakyat membangun pemerintahan representativ. Pada tahun 1993 hanya ada 1200 pasukan Amerika yang beroperasi di Somalia (Farhanditya, 2009). Kemudian sampai dengan tahun 2006 kembali terjadi perang besar yaitu perang antara antara ARPCT (*Alliance for Restorattion Peace and Counter Terrorism*) dengan kelompok Islamic Court Union Somalia. Perang ini dimulai pada pertengahan Februari 2006, perang ini berlanjut hingga bulan April 2006. Perang ini terjadi akibat tuduhan ARPCT yang menyebutkan bahwa ICU merupakan kelompok yang berkaitan dengan terorisme Al Qaeda. Kemudian perang ketiga terjadi padatahun 2007 yaitu perang lanjutan dari perang tahun 2006, perang ini diawali dengan intervensi yang dilakukan Ethiopia terhadap Somalia bulan Desember 2006 Pertempuran terjadi pada bulan Maret hingga April 2007, pada saat itu kabilah Al-Hawiyah mulai ikut bergabung bersama Islamic Court Union. Hawiye merupakan salah satu kelompok Islam yang berperan membantu Islamic Court Union melawan pemerintahan federal transisi Somalia. Dukungan yang diberikan oleh kelompok Hawiye terhadap Islamic Court Union meliputi dukungan pengiriman persenjataan, pengiriman tentara dan juga membantu melakukan berbagai serangan gerilya terhadap pemerintahan federal transisi (Gascoigne, 2007).

Melalui 3 perang besar yang terjadi di Somalia tersebut, eskalasi konflik dapat dilihat yaitu jumlah aktor yang semakin bertambah dan berbeda beda. Pada tahun 1993 aktor yang terlibat dalam konflik adalah PBB dan Amerika Serikat dengan kelompok yang dipimpin Farah Aidid dengan isu membawa perdamaian di Somalia namun misi PBB tersebut gagal dan keadaan Somalia anarkhi hingga pada beberapa tahun dan kelompok-kelompok kepentingan bermunculan salah satunya adalah Islamic Courts Union yang mampu membawa stabilitas di Somalia meskipun hanya beberapa bulan saja.

Kemudian perang yang terjadi tahun 2006 dan 2007 aktor yang terlibat semakin banyak dan isu konflik semakin kompleks. Yaitu perang yang terjadi karena perebutan kendali atas Somalia antara Islamic Courts Union yang mendapat dukungan dari masyarakat Somalia dengan ARPCT atau aliansi para *warlord* didukung oleh Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan terbentuknya TFG pada tahun 2004 yang juga memusuhi Islamic Courts Union serta intervensi yang dilakukan Ethiopia menambah jumlah aktor dan diikuti juga dengan bertambahnya pasukan militer serta teknologi persenjataan yang digunakan dalam konflik. Dengan rentetan konflik tersebut, maka dapat disimpulkan adanya eskalasi konflik di Somalia.

Islamic Courts Union

Lengsernya rezim pemerintahan Siyaad Barre pada tahun 1991 menciptakan sebuah fenomena terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan yang haus akan kekuasaan Somalia. Ketengangan terjadi antara kelompok-kelompok tersebut, Somaliapun tidak mempunyai pemerintahan tetap yang bisa mengatur kehidupan bernegaranya, keadaan Somalia menjadi kacau dan tidak ada yang bisa menghentikan hal tersebut.

Semenjak kekacauan yang terjadi di Somalia yang diakibatkan oleh kekosongan pemerintahan tersebut, aturan hukum Negara Somalia diatur oleh berbagai peradilan Islam (*Islamic Court*) yang berlandaskan pada Syariat Islam

sebagai dasar hukumnya. Mereka melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat seperti music dan film, dan pelanggarnya akan diberikan sanksi atau dihukum secara terbuka di depan umum. Pengadilan Islam pertama didirikan di Mogadishu pada tahun 1993 dibawah pimpinan Sheikh Ali Dheere.

Islamic Court juga didirikan karena kekalahan yang dialami oleh kelompok *al-Ittihad al-Islamiya* (AIAI) melawan pasukan Ethiopia, AIAI yaitu sebuah kelompok yang terbentuk pada tahun 1984 turunan dari *al-jamma al-Islamiya* dan *Wahdat al-Shabab al-Islam*. Kelompok tersebut terbentuk pada tahun 1960 ketika Sayyid Qutb dan tulisannya yang radikal mengenai militant Islam anti barat muncul dan populer di masyarakat Somalia. Selama beberapa dekade, dengan bantuan dari *Oromo Liberation Front* (OLF, sebuah kelompok etnis separatis Somali Ethiopia) kelompok ini telah melakukan serangan terhadap Ethiopia. Hingga pada tahun 2000 terbentuk 11 pengadilan-pengadilan Islam di Somalia yang dioperasikan secara terpisah di wilayah yang berbeda, masing-masing peraturan yang ada di masing-masing pengadilan tersebut berlaku terbatas pada wilayahnya masing-masing. Seiring perkembangan waktu pengadilan-pengadilan Islam Somalia mulai menawarkan pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk Somalia.

Dan pada tahun 2000 juga, 11 pengadilan tersebut bersatu dan membentuk membentuk *the Supreme Islamic Courts Union (al-Ittihad Mahakem al-Islamiya)* atau dikenal dengan nama lain ICU atau (*Islamic Courts Union*). Tujuan dari dibentuknya Islamic Courts Union ini adalah untuk membentuk Negara Somalia sebagai Negara Islam yang aman damai untuk ditinggali masyarakatnya. Mayoritas penduduk Somalia adalah muslim Sunni (Global Security). Tujuan lain dari ICU adalah untuk menegakkan pengambilan keputusan antar klan di Somalia, bukan hanya dalam klan sama saja. Mantan kolonel angkatan bersenjata Somalia, Sheikh Dahir Aweys dan Sheikh Ali Dheere memimpin jalannya implementasi dari peraturan ICU di Somalia dan bertanggungjawab untuk menyatukan pengadilan Islam dan

penggabungan mereka dibawah hukum Islam. Sistem pengadilan ICU dikontrol oleh seorang hakim yang disebut dengan Kryptocracy (Santoro, 1999).

Transformasi *Islamic Courts Union* dari Mediator menjadi kelompok yang ingin mendominasi kekuasaan di Somalia

Eskalasi konflik Somalia dapat terjadi karena perubahan peran dari *Islamic Courts Union* Somalia yang berawal dari sekelompok pengadilan Islam dimana kelompok ini menengahi konflik di Somalia kemudian memperkuat milisinya menjadi pengadilan Islam yang mendominasi kekuasaan di Somalia dengan tujuan menjadikan Somalia sebagai Negara Islam.

Tranformasi peran *Islamic Courts Union* tersebut dapat dibuktikan dengan menerapkan prinsip mediator yang baik dimana seiring dengan popularitas ICU di mata masyarakat Somalia, kelompok ini telah melanggar prinsip-prinsip mediator yang baik. Prinsip mediator yang baik diantaranya adalah jujur, mengedepankan nilai-nilai kehidupan, dapat dipercaya, berusaha menghindari kekerasan dan intimidasi, dan pemberdayaan para pihak yang berkonflik. ICU telah melanggar prinsip yang ketiga yaitu prinsip berusaha menghindari kekerasan dan intimidasi. Dalam melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah di Somalia, ICU melibatkan milisinya sehingga menimbulkan kekerasan dan intimidasi dengan *warlord* di wilayahnya masing-masing.

Ditambah dengan kondisi Somalia yang termasuk dalam kategori Negara lemah padal awal kemerdekaannya hingga pada masa pemerintahan Siyaad Barre.

Kondisi Somalia yang tidak bisa terlepas dari konflik internal menjadi salah satu indikator dari *weakstate* menurut Brown, pemerintahan yang tidak bisa mengontrol pertumbuhan kelompok pemberontak juga menunjukkan bahwa Somalia adalah Negara lemah serta keadaan ekonomi Somalia yang buruk juga semakin menunjukkan Somalia termasuk dalam kategori *weakstate*.

Pada saat mempunyai pemerintahan yang resmi, Somalia masih sering dilanda konflik yaitu konflik yang terjadi antar etnis hingga pada masa pemerintahan Siyaad Barre. Kondisi pemerintahan Somalia semakin buruk karena pada masa tersebut karena banyak terjadi korupsi dan ketidakpedulian pemimpin terhadap kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terbukti dengan sikap kepemimpinan Siyaad Barre selama 22 tahun yang otoriter dan mencoba membangun pemujaan kepribadian terhadapnya dengan cara menampilkan poster-poster bergambar Siyaad Barre di Mogadishu pada saat itu. Mohamed Siyaad Barre mengganti Somalia dengan nama Republik Demokratik Somali dengan menjadikan Somalia sebagai negara yang berpaham sosialis, Siyaad memperkenalkan kediktatoran Marxis yang brutal, menekankan supremasi partai dan bangsa yang bertentangan dengan kesetiaan klan lokal yang merupakan ciri kuat budaya Somalia.

Pada pertengahan ke akhir tahun 1970, terjadi peningkatan ketidakpuasan rakyat Somalia terhadap rezim Siyaad Barre. Hal tersebut terjadi karena korupsi yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah serta kinerja ekonomi pemerintahan yang buruk. Perang Ogaden juga telah melemahkan tentara Somalia dan menimbulkan pengurangan terhadap anggaran untuk pengeluaran militer. Pinjaman luar negeri meningkat tajam berbanding terbalik dengan pendapatan ekspor yang semakin menurun. Hutang Somalia sebanyak 4 miliar dolarmenyamai pendapatan Somalia dalam bidang ekspor pisang selama 75 tahun.

Rezim Siyaad Barre adalah kekuasaan dengan ciri-ciri pemerintahan diktator yang menindas, termasuk penganiayaan, memenjarakan dan menyiksa lawan politik dan pembangkang. *The United Nations Development Programme* menyatakan bahwa "rezim 22 tahun Siad Barre memiliki salah satu catatan hak asasi manusia yang terburuk di Afrika" (UNDP, 2001). Pada bulan Januari 1990, the *Africa Watch Committee*, cabang dari *Human Rights Watch organizational* merilis sebuah laporan berjudul "*Somalia A Government At War with Its Own People*" tersusun dari 268 halaman, laporan ini menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di wilayah utara Somalia. Laporan ini mencakup kesaksian tentang pembunuhan dan konflik di Somalia utara dengan pengungsi yang baru tiba dari berbagai negara di seluruh dunia.

Ada 4 kekuatan besar yang menguasai Somalia, yaitu Pemerintahan Federal Transisi atau TFG, Juba Valley Alliance (JVA) di Somalia bagian selatan, kemudain Puntland serta *self-declared independent* Somaliland. Keberadaan ICU mengancam 4 kekuatan besar Somalia tersebut sehingga menimbulkan konflik antara ICU dengan *warlord* atau pemegang kekuasaan di Somalia tersebut.

Keberhasilan ICU menguasai Mogadisu dan beberapa wilayah penting Somalia pada pertengahan tahun 2006 mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat Somalia meskipun ICU tidak diakui dunia internasional sebagai lembaga sah yang dapat mengatur dan meredam konflik Somalia. Transformasi ICU dari sebuah pengadilan menjadi kelompok yang dominan menguasai Somalia tersebut memicu tentangan dari Transitional Federal Government dan para *warlord* yang kemudian membentuk ARPCT. ICU bertujuan untuk menjadikan Somalia sebagai Negara Islam, sementara para *warlord* tidak menyetujui apabila Somalia menjadi Negara Islam. Ditambah lagi dengan menguatnya peran ICU di Mogadishu dikhawatirkan akan semakin menurunkan bahkan menghapus legitimasi masyarakat Somalia terhadap TFG sebagai pemerintahan yang sah dan diakui dunia internasional, sehingga konflik akan terus terjadi.

Kelompok kekuatan besar Somalia yang kedua adalah Juba Valley Alliance atau JVA atau *Isbahaysiga Dooxada Jubba* dalam bahasa Somali. JVA adalah salah satu fraksi politik Somalia yang mengontrol wilayah selatan Somalia yaitu Kismayo dan lembah sungai Juba atau yang dikenal dengan Jubaland. pemimpin JVA adalah Kolonel Barre Adan Shire Hiiraale, yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan untuk TFG. Komandan milisi dari JVA adalah Kolonel Abdulahi Sheik Ismael. Hubungan antara TFG dan JVA tersebut menyebabkan adanya indikasi kesamaan pola pemikiran, antara dua kelompok tersebut, yaitu menentang adanya keberadaan Islamic Courts Union yang semakin menguat di Somalia.

Islamic Courts Union berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah Somalia bagian selatan dengan mengalahkan pasukan JVA dan kelompok masyarakat yang menentang penerapan syariah Islam.

Kelompok penentang Islamic Courts Union yang ketiga adalah wilayah otonomi Puntland Somalia. Islamic Courts Union telah berhasil menaklukkan Mogadishu dan sebagian besar wilayah Somalia bagian selatan sepanjang tahun 2006. Kemudian Islamic Courts Union juga menginginkan untuk memberlakukan peraturan mereka yaitu syariah Islam ke seluruh wilayah Somalia yang berarti wilayah Puntland juga termasuk dalam rencana penaklukan Islamic Courts Union. Rencana tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan Puntland. Perbedaan kepentingan tersebut adalah Islamic Courts Union menginginkan untuk mengembalikan kekuasaan Somalia secara terpusat untuk pertamakalinya selama 15 tahun dibawah payung hukum syariat Islam Islamic Courts Union.

Puntland menggunakan hukum pidana sekuler yaitu memisahkannya dengan hukum agama. Keputusan pemerintahan Puntland adalah untuk menggunakan tipe hukum yang berbeda dari tipe hukum yang dipakai militant Islam di Mogadishu dimana Islamic Courts Union berkuasa. Perbedaan tersebut menyebabkan konflik Somalia semakin kompleks dan mengalami eskalasi.

Kondisi Negara Somalia yang termasuk dalam Negara dengan kategori *weakstate* menurut Michael E brown membuat pemerintahan resmi pada saat itu yaitu

pemerintahan Siyaad Barre tidak mampu membendung kekuatan kelompok pemberontak. Diantaranya adalah *Somali National Movement* (SNM), *Somali Workers Party* (SWP), *Democratic Front for Liberation of Somalia* yang kemudian bersatu membentuk *Somali Salvation Democratic Front* (SSDF) dalam rangka menggulingkan pemerintahan Siyaad Barre.

Namun setelah berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Siyaad Barre SSDF justru terpecah karena perbedaan kepentingan. Kekosongan pemerintahan resmi menyebabkan fenomena banyaknya kelompok-kelompok kepentingan berdasarkan etnis yang bertujuan untuk memegang kendali atas Somalia, salah satunya adalah Islamic Courts Union yang terbentuk pada tahun 2000. Selama kekosongan pemerintahan Somalia diatur oleh hukum Islam yang dijalankan oleh pengadilan-pengadilan Islam di berbagai wilayah di Somalia. Hingga pada tahun 2006 pergerakan ICU semakin menguat hingga ke wilayah Mogadishu. Selama menjalankan pengadilan Islam tersebut ICU mampu membawa stabilitas di Somalia (*the golden age era of peace seen by Somali since the start of the Somali civil war*).

Dari keberhasilan Islamic Courts Union tersebut terdapat kelompok-kelompok yang menentang ICU karena ketidaksamaan ideologi. Kelompok-kelompok tersebut adalah TFG, JVA, dan Puntland. Sehingga ketika Islamic Courts Union mencoba menerapkan syariah Islam di wilayah kekuasaan mereka terjadi penolakan hingga konflik yang berujung perang.

Dengan keadaan dalam negeri Somalia yang kacau dan tidak dapat mengontrol kelompok-kelompok kepentingan berdasarkan etnis tersebut menyebabkan konflik mengalami eskalasi yaitu dapat dilihat dari bertambahnya aktor yang terlibat. Pada rezim Siyaad Barre aktor yang terlibat konflik adalah antara pemerintah Siyaad Barre dengan para kelompok pemberontak. Setelah pemerintah runtuh konflik justru terjadi antara kelompok-kelompok pemberontak itu sendiri karena perbedaan pemikiran yang didasari etnis hingga menyebabkan terjadinya fenomena Negara dalam Negara di Somalia. Hingga pada akhirnya TFG terbentuk

dan ICU terbentuk, aktor dalam konflik bertambah karena banyak kelompok yang menentang ICU.

Intervensi Asing Sebagai Faktor Pendorong Eskalasi Konflik Somalia

ARPCT (*Alliance Restoration Peace and Counter Terrorism*) merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh para Warlord di Somalia pada bulan Februari tahun 2006. Motif dari para Warlord membentuk ARPCT ini adalah untuk menarik perhatian Amerika Serikat dengan menjadikan tujuan kelompok ini sebagai kelompok yang melawan penyebaran Islamic Courts Union karena dugaan terorisme dibaliknya untuk mendapatkan bantuan finansial dari Amerika Serikat. Sejak peristiwa pada tanggal 11 bulan September, 2001 di Amerika Serikat, Somalia telah berada di bawah radar AS untuk menjadi negara dengan kekosongan pemerintahan yang mempunyai potensi yang besar untuk menjadi tempat berkembangnya teroris Al Qaeda. Para pejabat AS telah lama khawatir bahwa Somalia dengan kekosongan pemerintahan akan menjadi basis ideal untuk Al Qaeda untuk bersembunyi dan merencanakan serangan terorisme, hal tersebut dapat terjadi karena mengingat keadaan Somalia yang anarkis dan para *Warlord* yang bersaing, ditambah dengan tidak adanya otoritas pusat yang efektif dan pasukan polisi serta sistem visa di Somalia.

Keterlibatan Amerika Serikat di Somalia didasarkan pada keinginan untuk melemahkan ancaman teroris. Dan skema inipun berhasil, pada bulan Juni ada banyak laporan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan keuangan kepada ARPCT. *International Crisis Group*, yang memiliki kontak langsung dengan para Warlord Somalia, menyatakan pada bulan Juni 2006 bahwa CIA telah menyalurkan \$100.000 per bulan ke ARPCT (Santoro, 1999). Bantuan dari Amerika Serikat diberikan setelah adanya laporan bahwa Islamic Courts Union telah menguasai Mogadishu Somalia dari ARPCT.

Operasi kontra terorisme yang dilakukan oleh ARPCT didukung Amerika Serikat menargetkan pada kelompok Islam yang ada di Somalia sebagai kelompok

yang diduga terkait dengan jaringan terorisme. Penduduk Somalia mulai merasa bahwa agama mereka dan pemimpin agama yang menjadi sasaran.

Konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan ARPCT ini adalah penolakan dari pemimpin agama, masyarakat sipil Somalia yang mayoritas beragama Islam dimana Islam menjadi target dari operasi ARPCT dukungan Amerika. Hal tersebut mengakibatkan Islamic Courts Union datang ke garis terdepan politik Somalia sebagai bagian dari gerakan penduduk Mogadishu yang ingin menyingkirkan para Warlord dari Mogadishu. Perang terbuka kemudian terjadi antara Islamic Courts Union melawan ARPCT.

Intervensi Ethiopia terhadap Somalia dimulai pada tahun 2006 bulan Desember. Anggota dari ARPCT yang mengalami kekalahan dengan ICU pada pertempuran sebelumnya tidak mempunyai pilihan lain selain bergabung dengan TFG yang sudah terasingkan akibat adanya ARPCT. Intervensi yang dilakukan Ethiopia ini merupakan permintaan dari TFG Somalia untuk membantu meredam konflik dengan Islamic Courts Union Somalia. Intervensi Ethiopia ini juga mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat serta dukungan dari Negara-negara lainnya karena Ethiopia membantu TFG sebagai pemerintahan sah yang diakui oleh dunia internasional. Amerika Serikat memutuskan untuk memimpin misi melawan ICU dengan memperkuat militer TFG dan melalui koordinasi yang baik dengan Ethiopia.

Intervensi yang dilakukan Ethiopia terhadap Somalia membentuk sebuah pola berupa penyangkalan dari TFG dan Ethiopia sendiri terhadap masyarakat Somalia dan ICU. Hal ini terlihat dari aksi militer yang dilakukan pasukan Ethiopia di Somalia yaitu pada pertempuran yang terjadi di Dinsoor tanggal 8 Desember 2006. Menteri pertahanan Somalia (TFG), Salat Ali Jelle menyatakan bahwa telah terjadi pertempuran di Dinsoor Somalia, namun tidak melibatkan pasukan Ethiopia (BBC, 2006). Hal ini juga ditegaskan oleh Pemerintah Ethiopia dalam pernyataan berikut, *“Ethiopia has denied repeated claims that its troops are fighting alongside government militia but admits to having hundreds of military trainers in Baidoa”* (BBC, 2006) kedua pernyataan dari Ethiopia dan TFG tersebut bertentangan dengan

pernyataan Komandan Pasukan Islamic Courts Union berikut "*Our forces have been raided by Ethiopian troops, so people get up and fight against the Ethiopians,*" (BBC, 2006). Tudingan dan penyangkalan atas keterlibatan Ethiopia ini menunjukkan kecurigaan yang mengindikasikan adanya campur tangan langsung Ethiopia terhadap konflik internal Somalia. Namun, Penyangkalan ini berakhir pada tanggal 24 Desember tahun 2006, Secara terbuka Menteri Informasi Ethiopia menyatakan "*The Ethiopian government has taken self-defensive measures and started counterattacking the aggressive extremist forces of the Islamic Courts and foreign terrorist groups.*" (BBC, Ethiopia admits Somalia offensive, 2006). Pernyataan terbuka menteri informasi Ethiopia tersebut kemudian diikuti dengan serangan secara sporadis di kota-kota Somalia.

Intervensi yang dilakukan Ethiopia terhadap Somalia justru membuat konflik internal Somalia mengalami eskalasi dari sudut pandang aktor yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Somalia bertambah dengan ikut masuknya Ethiopia. sehingga konflik tidak hanya melibatkan TFG dan Islamic Courts Union saja, melainkan juga Ethiopia yang melakukan intervensi dalam rangka membantu TFG untuk melawan Islamic Courts Union Somalia.

Kesimpulan

Eskalasi konflik yang terjadi di Somalia disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu faktor dalam negeri dan dari luar negeri atau intervensi asing. Faktor dari dalam negeri Somalia sendiri berasal dari kondisi Somalia sebagai Negara yang lemah dan transformasi ICU sebagai lembaga pengadilan menjadi lembaga yang dominan menguasai Somalia yang kemudian menimbulkan *warlord* yang memusuhi ICU. Dapat dikatakan sebagai *weakstate* karena Somalia merupakan Negara yang selalu berada dalam konflik, pemerintah tidak mampu menyelesaikan atau meredam konflik yang terjadi di dalam negerinya sendiri hingga memunculkan berbagai kelompok kepentingan yang berusaha merebut kekuasaan dari pemerintahan resmi Somalia hingga pada akhirnya terjadi kekosongan pemerintahan dan kelompok

kepentingan memegang kendali atas wilayahnya masing masing. Kemudian terbentuk ICU yang mampu membawa Somalia ke arah perdamaian dan keamanan, Somalia sempat berada dalam kondisi yang aman selama 6 bulan pada tahun 2006. Namun karena adanya transformasi peran ICU dari sebuah mediator menjadi kelompok kepentingan yang ingin menguasai Somalia kemudian membuat *warlord* memusuhi ICU maka konflikpun kembali terjadi dan mengalami eskalasi.

Ditambah lagi dengan adanya intervensi dari Negara asing yaitu kedatangan Ethiopia serta dukungan Amerika Serikat terhadap ARPCT yaitu aliansi yang dibentuk para *warlord* yang berkedok memerangi terorisme dengan menuduh ICU sebagai ladang terorisme di Somalia membuat konflik di Somalia semakin parah dan menimbulkan banyak korban. Sebelum adanya intervensi asing pada tahun 2006 di Somalia terdapat banyak kelompok yang terbentuk akibat dari kondisi Somalia sebagai *weakstate*. Kelompok tersebut pada akhirnya berubah menjadi *warlord*, mempunyai daerah kekuasaan sendiri dan menentang keberadaan ICU. Sehingga menimbulkan perang sipil, namun dalam perang tersebut ICU masih bisa mempertahankan kekuatannya dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat Somalia. Hal tersebut membuat *warlord* pada akhirnya merasa membutuhkan bantuan dari luar negeri untuk menyingkirkan ICU dari Somalia, hingga mereka membentuk ARPCT dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat karena ARPCT merupakan aliansi yang terbentuk dengan tujuan memerangi terorisme sedangkan Amerika mendukung siapa saja yang mempunyai tujuan untuk memerangi terorisme dan ICU diindikasikan oleh ARPCT dan Amerika Serikat sebagai terorisme di Somalia.

Faktor intervensi asing merupakan tindak lanjutan dari faktor dalam negeri Somalia dimana *warlord* yang memusuhi ICU tidak cukup kuat untuk mengalahkan ICU dari Somalia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempunyai peranan lebih besar dalam terjadinya eskalasi konflik Somalia pasca berdirinya ICU adalah faktor dari dalam negeri Somalia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul, H. A. (2008). *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Bandung: CV Angkasa.

Cedric Barnes, S. a. (2007). *The Rise and Fall of Mogadishu's Islamic*. London: chathamhouse.

(2001). In C. A. Crocker, *Turbulent Peace The Challenges Of Managing International Conflict*. Whashington DC.

(1991). *Kamus Umum Berbahasa Indonesia*. In W. J.S Poerwadarmanta. akarta: Balai Pustaka.

Jatmika, S. (2015). *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*. Yogyakarta.

(2002). In Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja* (p. 67). Malang: Taroda.

(2001). In D. R. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (p. 98). Jakarta: PT Rineka Cipta.

(2007). In H. Miall, *RESOLUSI DAMAI KONFLIK KONTEMPORER* (p. 7). Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal dan Artikel

Farhanditya, Y. (2009, December 3). *mengenang the battle of mogadishu* (3 & 4 Oktober 1993).

Gascoigne, B. (2007). *history of Somalia*. Retrieved 12 30, 2015, from history world: <http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ad20>

Hartati, A. Y. (2011). *Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil*. 5.

R.E.T. (2015, 1 12). *Perang Sipil Somalia, Kekacauan Tanpa Akhir di Tanduk Afrika*. Retrieved 1 10, 2016, from HIVE: <http://www.re.tawon.com/2015/01/perang-sipil-somalia-kekacauan-tanpa.html?m=1>

Rahmawati, T. (2015). *Peranan PBB dalam Penyelesaian Permasalahan Krisis Kemanusiaan di Somalia*. Retrieved 9 11, 2015, from <
http://diplomacy945.com/2010/06/peranan-pbb-dalam-penyelesaian_02.html>

Olson, M. B. (2003). *Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners*. Cambridge.

Pramoda, A. R. (2014). *Peranan Ethiopia dalam Konflik di Somalia*. 55.

thoyyibah, q. a. (2015, 07 17). Retrieved 12 20, 2015, from <http://dokumen.tips/documents/negara-somalia.html>

Website

BBC NEWS. (1999, 07 23). Retrieved 01 11, 2016, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/07/99/battle_in_the_horn/399898.stm

(2007). Retrieved 09 12, 2015, from antara news: <http://www.antara.co.id/arc/2007/4/22/perang-di-mogadishu-meluas-ratusan-orang-tewas/>

Aulia, L. N. (2008, January 3). *era muslim*. Retrieved 11 31, 2015, from era muslim: <http://m.eramuslim.com/berita/dunia-islam/dalam-satu-tahun-14-ribu-orang-meninggal-akibat-konflik-senjata-di-somalia.htm>

National Counter Terrorism. (2013). *Counter Terrorism*. Retrieved 03 28, 2016, from http://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html

Global Security. (n.d.). Retrieved 01 08, 2016, from <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/icu.htm>

Kaplan, E. (2006, 08 07). *council on foreign relation*. Retrieved 01 18, 2016, from <http://www.cfr.org/somalia/somalias-high-stakes-power-struggle/p11234>

Maiese, M. (2003). *Destructive escalation*. Retrieved 10 21 , 2015, from www.beyondintractability.org/essay/escalation

Pruitt, D. G. (1986). *Conflict Research Consortium BOOK SUMMARY*. Retrieved 10 21, 2015, from <http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/pruitt.htm>

Santoro, L. (1999, July 13). *Islamic Clerics Combat Lawlessness in Somalia*. Retrieved 01 08, 2016, from Christian Science Monitor: www.csmonitor.com/1999/0713/pls2.html

Standford.edu. (n.d.). Retrieved 01 14, 2016, from Mapping Millitant Organization: <https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/107>

Stephanie Hanson, a. E. (2008, 05 12). *council on foreign relation*. Retrieved 01 15, 2016, from <http://www.cfr.org/somalia/somalias-transitional-government/p12475>